

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan dan Teori

Pada penelitian suatu karya ilmiah, tinjauan kebijakan dan teori sangat penting untuk memberikan landasan yang kuat dan mendalam dalam proses analisis dan interpretasi data. Adanya tinjauan kebijakan dapat membantu peneliti memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi di balik topik yang diteliti, serta mengetahui kebijakan yang memengaruhi isu tersebut. Sementara itu, teori memberikan kerangka konseptual yang diperlukan untuk memahami fenomena yang diamati dengan didukung oleh bukti empiris. Dengan mengintegrasikan tinjauan kebijakan dan teori ke dalam penelitian ini, dapat memudahkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai, sebagai berikut:

1. Tinjauan Kebijakan

a. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah salah satu karakteristik utama dari negara demokratis yang memprioritaskan kepentingan rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggara negara dan lembaga publik lainnya yang menggunakan anggaran negara, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Indonesia, hal tersebut telah diatur oleh UU 14/2008 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Menurut UU tersebut, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.